

## **LITERATURE REVIEW :ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI WILAYAH PESISIR MEDAN BELAWAN**

Susilawati, Nadia Hendra Pratama

Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara

[nadahendrap02@gmail.com](mailto:nadahendrap02@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Stunting is a world problem because its implications determine the future of the nation. Stunting is a problem of malnutrition, a chronic disease caused by inadequate nutritional intake for a long time, providing food that does not match nutritional needs. Stunting can occur starting from the fetus is still in the womb and will be seen when the child is two years old (Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 2016). The method used is a literature study from various international and national journals, this method is made to summarize the current state of understanding of a topic. Based on the results of interviews with informants, information was obtained that the standard for implementing policies to accelerate the reduction of stunting, the government already has standards, namely the 2020 Medan Belawan Regulation Concerning the Acceleration of Stunting Reduction in accordance with the mandate of RI Presidential Regulation No. 42 of 2013 concerning the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement which has now been replaced by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2021 concerning Accelerating the Reduction of Stunting.*

**Keywords: Implementation, Policy, Stunting Reduction**

### **ABSTRAK**

Stunting menjadi masalah dunia karena implikasinya menentukan masa dengan bangsa. Stunting adalah masalah kekurangan gizi penyakit kronis yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak memadai dalam waktu yang lama pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dapat terjadinya stunting mulai janin masih berada dalam kandungan dan akan kelihatan saat anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai jurnal internasional maupun nasional, metode ini dibuat untuk merangkum kondisi pemahaman terkini mengenai suatu topik. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh keterangan bahwa standar dalam menjalankan kebijakan percepatan penurunan stunting, pemerintah sudah memiliki standar yakni dengan adanya Peraturan Medan Belawan Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penurunan Stunting**

## PENDAHULUAN

Stunting menjadi masalah dunia karena implikasinya menentukan masa dengan bangsa. Stunting adalah masalah kekurangan gizi penyakit kronis yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak memadai dalam waktu yang lama pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dapat terjadinya stunting mulai janin masih berada dalam kandungan dan akan kelihatan saat anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Stunting yang sudah terjadi jika tidak diimbangi dengan catch-up growth dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan, Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan risiko morbiditas, mortalitas, dan retardasi pertumbuhan motorik halus maupun mental. Stunting dibentuk oleh growth faltering dan catch up growth yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2021; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Prevalensi bayi stunting yang berusia di bawah lima tahun (balita) Indonesia pada 2019 sebesar 36,4%. Yang dimaksud lebih dari sepertiga atau sekitar 8,8 juta balita sudah mengalami masalah gizi yang dimana tinggi badannya di bawah standar sesuai usianya. Stunting tersebut berada di atas ambang yang telah ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Dan prevalensi stunting di medan kota belawan sebesar 15%.

Prevalensi balita stunting Indonesia yaitu terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara di bawah Laos yang mencapai 43,8%. Namun, berdasarkan Pantauan Status Gizi (PSG) 2021, balita yang mengalami stunting tercatat sebesar 26,6%. Angka tersebut terdiri dari 9,8% masuk kategori sangat pendek dan 19,8% kategori pendek. Dalam 1.000 hari pertama sebenarnya merupakan usia emas bayi tetapi kenyataannya masih banyak balita usia 0- 59 bulan pertama justru mengalami masalah gizi. Guna menekan masalah gizi balita, pemerintah melakukan gerakan nasional pencegahan stunting dan kerjasama kemitraan multi sektor. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerapkan 160 kabupaten prioritas penurunan stunting. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, terdapat 15 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting di atas 50% (Bhutta et al., 2010; UNICEF, 2017).

Pada tahun 2019 Kemenkes RI kembali melakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) tentang Prevalensi Stunting. Berdasarkan Penelitian tersebut angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2 persen pada Riskesdas 2021 menjadi 30,8 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Penilaian status gizi pada balita yang paling sering dilakukan adalah dengan cara penilaian antropometri. Secara umum antropometri berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi.

Antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut tinggi badan

(BB/TB) yang dinyatakan dengan standar deviasi unit z (Z- score) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Untuk menangani kasus stunting Masyarakat Desa Belawan baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, lembaga desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, kader posyandu, kader desa, bidan desa, guru PAUD serta masyarakat yang peduli kesehatan dan pendidikan berperan aktif dalam memonitor seluruh sasaran stunting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam mendapatkan intervensi sebagai berikut : pada stunting di medan kota belawan termasuk tinggi maka dari itu pada jurnal ini di jelaskan pada permasalahan stunting dan bagaimana cara pencegahannya.

Tingginya Kejadian stunting di suatu daerah secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh factor ekonomi, sebab faktor non kesehatan seperti ketersediaan air bersih, pola asuh anak, pengetahuan ibu hamil, hingga masalah ekonomi keluarga berpengaruh 70% dalam menambah angka stunting (Saaadatudaraen 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai jurnal internasional maupun nasional, metode ini dibuat untuk merangkum kondisi pemahaman terkini mengenai suatu topik. Studi literatur menyajikan kembali hasil dari materi yang telah diterbitkan sebelumnya, dan melaporkan fakta atau analisis baru dan tinjauan literatur memberikan ringkasan yaitu berupa publikasi terbaik dan paling relevan kemudian membandingkan hasil yang disajikan dalam sebuah artikel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyebab utama mengakibatkan meningkatnya angka anak yang mengalami Stunting di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kesadaran terhadap pencegahan stunting, kebijakan yang tidak harmonis dalam mendukung pencegahan terjadinya stunting, dan masalah komunikasi dengan perubahan suatu perilaku pada tingkat individu, masyarakat dan pelayanan kesehatan. (Kemenkes RI, 2021).

Angka stunting di [Kota Medan](#) hingga kini masih cukup tinggi dengan jumlah 550 anak, di mana Kecamatan Medan Belawan sebagai penyumbang tertinggi. Dari total jumlah penderita stunting yaitu, 20 persen yang di antaranya anak berusia di atas 2 tahun sehingga sulit untuk dipulihkan. Selain penyelesaian masalah pemukiman yang menjadi salah satu pemicu terjadinya stunting, Pemko Medan juga telah menyiapkan sejumlah program untuk mencegah sekaligus mengatasi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari usianya tersebut.

Stunting adalah masalah kekurangan gizi penyakit kronis yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak memadai dalam waktu yang lama pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dan pada provinsi Sumatera Utara tepatnya kota Belawan Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun, dan bila tidak diimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan anak, masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Stunting dibentuk oleh growth faltering dan

catch up growth yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal (World Health Organization, 2019). Pemerintah ini membuat langkah-langkah untuk mengurangi Prevalensi stunting yang kian menjadi permasalahan gizi di Indonesia. Hal – hal ini menjadi suatu konsen khusus hingga dibahas melalui rapat yang dipimpin langsung oleh ketua TP2NK pada tahun 2017 dan mengajak pemerintah dan lembaga terkait untuk fokus dan melaksanakan intervensi – intervensi yang sudah dirapatkan guna mengurangi kejadian stunting langkah tersebut diambil pemerintah agar diharapkan beban pemerintah tentang kesehatan khususnya dibidang gizi angkanya akan menurun.

Dalam rangka meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Stunting Summit yang mengusung tema “Bersama Cegah Stunting” pada 28 Maret 2018, di kota Belawan, Sumatera utara. Tema ini dipilih karena Kementerian PPN/Bappenas berpandangan bahwa penanganan masalah stunting di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan multi-sektor, yaitu melibatkan 17 Kementerian/Lembaga (K/L) teknis dan satu Kementerian Koordinator, serta bekerjasama dengan para pemangku kepentingan pembangunan, antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta media massa. Dihadiri 34 dokter anak seluruh Indonesia, 20 dinas kesehatan lokasi prioritas penurunan stunting, 33 bupati lokasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM), serta 100 kepala desa sumatera utara, dengan jumlah keseluruhan peserta Stunting Summit sebanyak 1.000 orang (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).

Stunting Summit merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia. Stunting Summit menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota prioritas, terutama pada medan kota belawan dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. Diharapkan atas segala upaya pencegahan stunting akan ada terus kemajuan untuk menurunnya angka tersebut dan dibarengi dengan adanya komitmen serius antara pemerintah dan masyarakat untuk menuntaskan hal ini. Pemerintah Indonesia melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam targetnya diharapkan pada tahun 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi, penurunan stunting dan wasting pada balita (Sustainable & Goals, 2016). Dan juga Indonesia yang telah bergabung dalam Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) Movements.

Implementasi kebijakan dapat dinilai kinerjanya melalui keberhasilan dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan, maka akan sulit juga untuk dapat melaksanakannya. Sehingga untuk dapat melihat kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran dalam memberikan penjelasan terkait peraturan yang menjadi landasan implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi dan apakah para pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Pada anak penyebab utama terjadinya stunting adalah kurang gizi. Terutama 1000 hari pertama dari kehidupan anak. Selain itu namun, ada beberapa yang menyebabkan anak terjadinya stunting, yaitu faktor ibu, faktor rumah tangga dan keluarga, lingkungan rumah, infeksi berulang. Cara mencegah stunting adalah pentingnya ASI, pemeriksaan secara rutin, konsumsi asam folat, tingkatkan kebersihan, pahami konsep gizi, faktor sanitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh keterangan bahwa standar dalam menjalankan kebijakan percepatan penurunan stunting, pemerintah sudah memiliki standar yakni dengan adanya Peraturan Medan Belawan Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jika dilihat adanya peraturan Di Kecamatan Medan Belawan tahun 2020 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi sudah cukup efektif untuk dijadikan landasan oleh para pelaksana dalam menjalankan kebijakan penurunan stunting di wilayah pesisir Kecamatan Medan Belawan.

## **KESIMPULAN**

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh keterangan bahwa standar dalam menjalankan kebijakan percepatan penurunan stunting, pemerintah sudah memiliki standar yakni dengan adanya Peraturan Medan Belawan Tahun 2020 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jika dilihat adanya peraturan Di Kecamatan Medan Belawan tahun 2020 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi sudah cukup efektif untuk dijadikan landasan oleh para pelaksana dalam menjalankan kebijakan penurunan stunting di wilayah pesisir Kecamatan Medan Belawan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ikhsan, M. Yusran, R. 2023. PELAKSANAAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA PADANG. Jurnal : Ilmu Sosial Dan Pendidikan.
- Indah, S. Yusran, R. 2022. UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI NAGARI INDEPURA BARAT KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN. Jurnal : Pendidikan Tambusai.
- Julianti, E. 2022. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA NANGARAYA KECAMATAN BELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT KECAMATAN BELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta.

- Priyono. 2020. Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang).  
Jurnal : Jurnal Good Governance
- Rahmadhita, K. 2020. PERMASALAHAN STUNTING DAN PENCEGAHANNYA. Jurnal :  
Ilmiah Kesehatan Sandi Husada.
- Rusdi, A. 2023. ANALISIS UPAYA PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING DI PUSKESMAS BELAWAN. Skripsi. Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Shauma, U, N. Purbaningrum, G, D. 2022. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN  
PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI. Jurnal : Kebijakan Publik.
- Yulmaniati. 2023. PEMANFAATAN HASIL PANGAN LOKAL DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN STUNTING DI DESA BANDAR BARU KECAMATAN  
SIBOLANGIT SUMATERA UTARA. Jurnal : Program Studi PGMI.